

TESIS

**URGENSI UNIFIKASI PEJABAT YANG BERWENANG
MENERBITKAN ALAT BUKTI AHLI WARIS**



OLEH :

PUTRI MINDYA RAHMANI, S.H.

NIM. 032014253005

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**URGENSI UNIFIKASI PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN
ALAT BUKTI AHLI WARIS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**PUTRI MINDYA RAHMANI, S.H.
NIM. 032014253005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 13 Januari 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
NIP. 197103041997022001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP. 197111131997022001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 13 Januari 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003**

**Anggota : 1. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
NIP. 197103041997022001
2. Dr. Soelistyowati, S.H., M.Hum.
NIP. 197111131997022001
3. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198402172006041001
4. Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.M., LL.M.
NIP. 197705292003122003**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Mindya Rahmani, S.H.

NIM : 032014253005

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarah dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 13 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. A unique serial number '5A545AJX017204510' is visible at the bottom of the stamp.

Putri Mindya Rahmani, S.H.
NIM. 032014253005

MOTTO

“Sabar dan Syukur”

ABSTRAK

Penelitian tesis ini memiliki dua pokok permasalahan yaitu (1) Ratio legis penetapan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021; dan (2) Unifikasi wewenang pejabat/ lembaga yang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris yang berkepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ratio legis penunjukkan Pejabat/Lembaga yang berwenang menerbitkan alat bukti ahli waris menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti sebagai ahli waris. (2) Unifikasi wewenang Pejabat yang menerbitkan alat bukti sebagai ahli waris dapat ditempuh melalui pendelegasian wewenang oleh pemerintah kepada instansi pemerintah lainnya, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena kewarisan merupakan bagian dari hukum orang yang selama ini pengadministrasiannya telah menjadi tugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci : Hukum Waris; Alat Bukti Ahli Waris; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABSTRACT

This research has two main issues, (1) Legislative ratio determination of Officials/Institutions authorized to issue evidence as heirs according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 16 of 2021; and (2) Unification of the authority of the official/institution that issues evidence as heirs with legal certainty. This research is a normative juridical research conducted by researching library materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The approach used is the statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this study that (1) the legislative ratio of appointing Officials/Institutions authorized to issue evidence of heirs according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 16 of 2021 is to provide convenience for people who need evidence as heirs. (2) Unification of the authority of the official who issues evidence as heirs can be reached through the delegation of authority by the government to other government agencies, namely the Office of Population and Civil Registration. Because inheritance is part of the law of people whose administration has been the duty of the Office of Population and Civil Registration.

Keywords : *Inheritance Law, Evidence of Heirs, Department of Population and Civil Registration.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga melimpahkan banyak kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul “Urgensi Unifikasi Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Alat Bukti Ahli Waris” dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis secara khusus berterima kasih kepada:

1. Suami dan anak tercinta penulis, suami tercinta Letda Laut (KH) dr. Muhammad Fadil.
2. Keluarga penulis, Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si. dan ibunda tercinta Didin Yudhadini, S.H. yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang serta mendoakan penulis. Serta kakak tercinta Letda Laut (KH) Dzulkarnain Alghafuru Syahputra, S.H. dan kedua adik penulis tercinta yang telah mendoakan, mendukung sehingga bisa menyelesaikan tesis ini.
3. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang membantu penulis selama masa bimbingan tesis.
5. Dosen-dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang membantu banyak selama penulis menuntut ilmu.
7. Teman-teman penulis, penulis semasa kuliah maupun di luar kuliah.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Surabaya, 13 Januari 2022

Penulis,

Putri Mindya Rahmani, S.H.

NIM. 032014253005

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Staatblad 1847 Nomor 23.

HetHerzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Staatblad 1941 Nomor 44.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Teoritis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Metodologi Penelitian.....	13
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	13
1.5.2 Pendekatan (<i>approach</i>)	14
1.5.3 Sumber bahan hukum (<i>Legal Sources</i>)	16

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....	18
BAB II – RATIO LEGIS PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN ALAT BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS	20
2.1 Pluralisme Hukum Waris di Indonesia	20
2.2 Hukum Waris Menurut Bentuknya.....	31
2.3 Alat Bukti Sebagai Ahli Waris	33
2.4 Fungsi dan Tugas Utama Pejabat/Lembaga Yang Berwenang Menerbitkan Alat Bukti Sebagai Ahli Waris	39
a. Fungsi dan Tugas Utama Pengadilan.....	39
b. Fungsi dan Tugas Utama Notaris.....	42
c. Fungsi dan Tugas Utama Balai Harta Peninggalan	46
d. Fungsi dan Tugas Utama Kepala Desa/Lurah dan Camat	47
2.5 Ratio Legis Pengaturan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/KBPN No. 16/2021.....	49
BAB III – REFORMULASI PEJABAT/LEMBAGA YANG BERWENANG MENERBITKAN ALAT BUKTI SEBAGAI AHLI WARIS	54
3.1. Penunjukkan Pejabat/Lembaga Yang Dapat Menerbitkan Alat Bukti Sebagai Ahli Waris	54
a. mengenai bentuk alat buktinya	61
b. mengenai hukum warisnya	64
3.2. Sengketa Mengenai Alat Bukti Sebagai Ahli Waris.....	68
3.3. Harmonisasi Hukum Terhadap Alat Bukti Sebagai Ahli Waris	84

3.4. Unifikasi Wewenang Pejabat Yang Menerbitkan Alat Bukti Sebagai Ahli Waris	86
BAB IV - PENUTUP	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran	93
DAFTAR BACAAN	xv